



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FENDIAWAN TISKIANTORO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 209483

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 353 m2/96 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/220 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 200.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER EXCEED 1.5 L Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 22.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 24.020.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.896.020.000

III. HUTANG

Rp. 9.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.887.020.000

Catatan:



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEWI YULIAWATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 212699

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 375.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/50 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000
2. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.503.502

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 504.003.502

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 504.003.502

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMPERANTO KUSNARDI
2. Jabatan : KEPALA PELABUHAN
3. NHK : 224390

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah Seluas 208 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 38.250.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HADIAH Rp. 3.250.000
2. MOBIL, PEUGEOT 206 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 80.260.884

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 793.510.884

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 793.510.884

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIK HARNADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 209507

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.001.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/90 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000
4. Tanah Seluas 191 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 37.000.000
5. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 32.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1979, WARISAN Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1984, WARISAN Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 49.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 267.641.515**F. HARTA LAINNYA** Rp. 13.239.714

Sub Total Rp. 1.437.381.229



III. HUTANG

Rp. 58.688.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.378.692.829

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNUS MINTARSO
2. Jabatan : KEPALA PELABUHAN
3. NHK : 221342

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m²/294 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 1.422 m² di KAB / KOTA REMBANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 163 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 84 m² di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO M3 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 53.871.329**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 998.871.329

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 998.871.329

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERMIN DEWI SULISTIJANI
2. Jabatan : KEPALA CABANG
3. NHK : 419939

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/21 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/21 m2 di BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 87.500.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. 1.395.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 334.866.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.517.366.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.517.366.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JAMALUDIN MALIK**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**
3. NHK : **831948**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**Rp. **5.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 20.040 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
6. Tanah Seluas 17.810 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
7. Tanah Seluas 18.340 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
8. Tanah Seluas 19.230 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
9. Tanah Seluas 17.200 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
10. Tanah Seluas 17.440 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
11. Tanah Seluas 19.700 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 220.000.000
12. Tanah Seluas 17.910 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH



TANPA AKTA Rp. 220.000.000

13. Tanah Seluas 17.780 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH

TANPA AKTA Rp. 220.000.000

14. Tanah Seluas 19.680 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, HIBAH

TANPA AKTA Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 808.500.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun 2019,

HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 8.500.000

3. LAINNYA, KUBOTA DC 70 PLUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 115.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 780.085.423

F. HARTA LAINNYA

Rp. 100.000.000

Sub Total

Rp. 6.853.585.423

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.853.585.423

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDI KRISTIANA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN
3. NHK : 831941

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, HONDA AFX12U21C08M Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	333.709
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	307.333.709
III. HUTANG	Rp.	192.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	115.333.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 November 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DINA MAYASARI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KOMODITAS
3. NHK : 828556

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.540.000.000

1. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. Tanah Seluas 1565 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 152.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2012, HADIAH Rp. 152.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 166.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 2.921.000.000

III. HUTANG Rp. ---

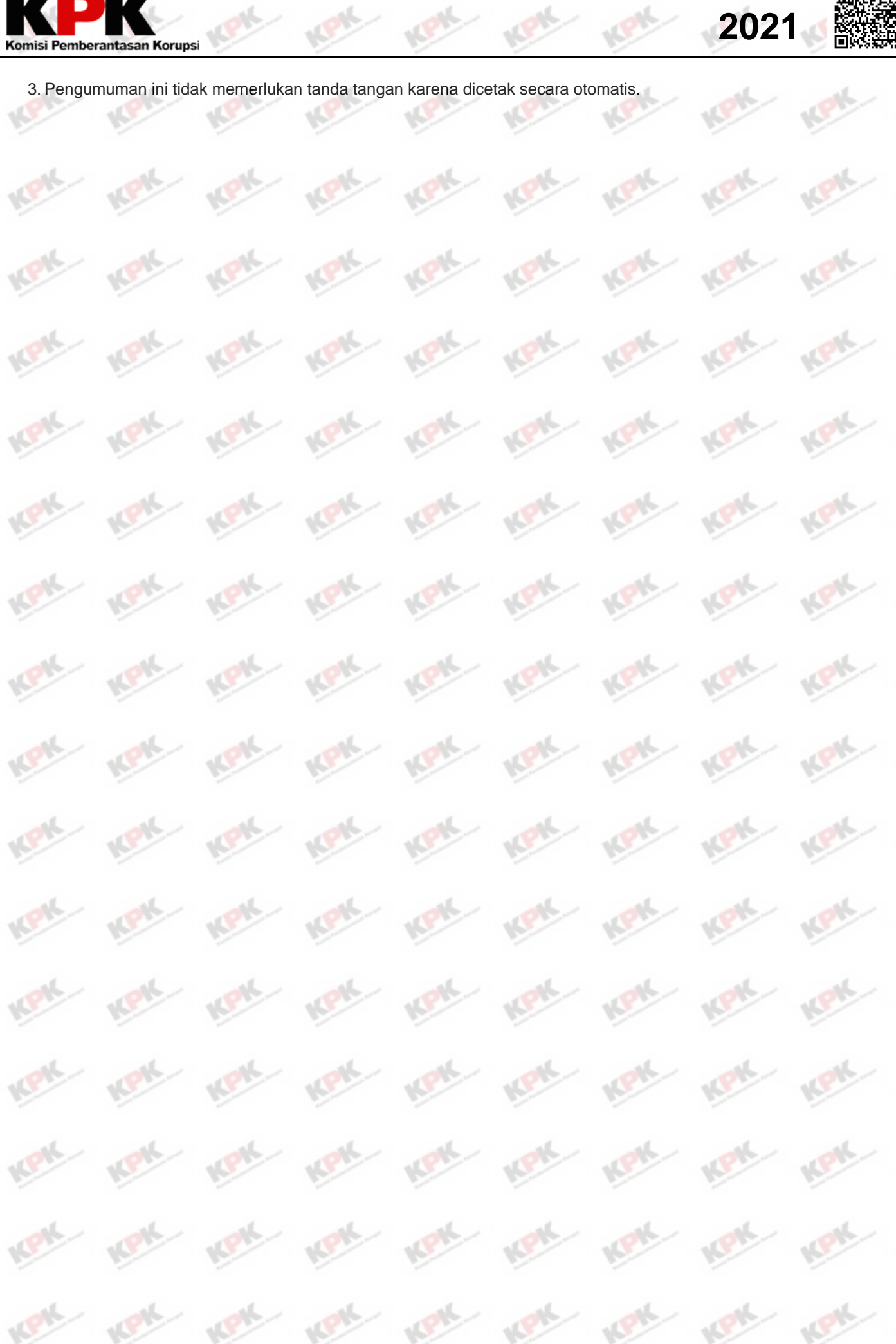
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.921.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROHITA ARUM
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
3. NHK : 716306

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, DATSUN DATSUN GO Tahun 2018, HASIL SENDIRI	Rp.	100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	350.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	350.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUGIONO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 831517

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 750 m2/378 m2 di KAB / KOTA BATANG, LAINNYA Rp. 250.000.000		
2. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	35.000.000
1. MOTOR, NMAX SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG ROVER Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	437.020.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	437.020.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NINIK PUJIASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 410799

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m²/100 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 2155 m² di KLATEN, WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 2190 m² di KLATEN, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOBIL, ERTIGA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA P5E02R22M1 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 159.700.293

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.529.700.293

III. HUTANG Rp. 25.599.550

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.504.100.743

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SUPRIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**
3. NHK : **211478**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/100 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **138.000.000**

1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA A1FO2N37N1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **34.500.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **40.032.906**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **912.532.906**

III. HUTANG Rp. **32.500.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **880.032.906**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDI KRISTIANA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN
3. NHK : 831941

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, HONDA AFX12U21C08M Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	333.709
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	307.333.709
III. HUTANG	Rp.	192.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	115.333.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET RAHARJO**
2. Jabatan : **KEPALA PELABUHAN**
3. NHK : **769500**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.580.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/120 m2 di TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 305.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/110 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 305.000.000
3. Tanah Seluas 3849 m2 di KOTA TEGAL , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 275.000.000
4. Tanah Seluas 4846 m2 di TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 3593 m2 di TEGAL, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000
6. Tanah Seluas 3300 m2 di TEGAL, WARISAN Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 110.700.000

1. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SKUTER MATIK/54P Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.850.000
3. MOTOR, HONDA GL 200 SPORT Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000
4. MOTOR, HONDA GL 160 D CW Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000
5. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000



6. MOTOR, YAMAHA SKUTER MATIK/54P Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.850.000		
7. MOTOR, HONDA GL 200 SPORT Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000		
8. MOTOR, HONDA GL 160 D CW Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.300.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.550.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.692.250.000
III. HUTANG	Rp.	82.025.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.610.225.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIAS ELVI SOEBEKTI MARTININGTYAS
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN
3. NHK : 416959

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/10 m2 di KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	8.000.000
1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.269.619
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	211.269.619
III. HUTANG	Rp.	17.580.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	193.689.619

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.